



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Jl. Jend. A. Yani No. 06 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 63197, Website : www.jambiprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Sejalan dengan terpilihnya Gubernur Provinsi Jambi Periode 2016-2021 dengan Visi **"Jambi Tuntas"** (Tertib, Unggul, Nyaman, Adil dan Sejahtera) dan dengan Misi ke-2 **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis, dan Berkesetaraan Gender"**, serta Misi ke-4 **"Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan berbasis Agribisnis dan Agroindustri"**. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis yang merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam membuat keputusan beresiko dengan memanfaatkan pengetahuan yang sifatnya antisipatif dan diorganisasi secara sistematis. Segala upaya guna melaksanakan keputusan tersebut serta dapat mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik maka harus dilakukan secara terorganisasi dan sistematis pula.

Rencana Strategis ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan seluruh jajaran pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan pihak lain yang berkepentingan (*stake holder*) serta masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil kerja dan prestasi yang senantiasa meningkat dan terukur. Dalam perumusan Rencana Strategis, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kewenangan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan segala kekurangannya kami telah berhasil menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan semoga benar-benar bermanfaat dan mendukung visi Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Juni 2018


KEPALA DINAS,
H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Landasan Hukum	3
c. Maksud dan Tujuan	5
d. Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI	7
a. Gambaran Umum Organisasi	7
b. Pencapaian Kinerja Pelayanan	11
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16
a. Ketersediaan Layanan Pendidikan	17
b. Keterjangkauan Memperoleh Layanan Pendidikan	18
c. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	18
d. Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan	19
e. Kepastian	19
f. Tata Kelola Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan	25
g. Tantangan Pembangunan Pendidikan	26
h. Telaah, Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
A. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi	30
B. Keterkaitan Nawacita, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi serta Janji Politik Gubernur	33
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	33
D. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	34
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI INDIKASI KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	60
BAB VII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja berdasarkan APK dan APMTahun 2010-2015	13
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Tahun berdasarkan Jumlah Lembaga Tahun 2010-2015	13
Tabel 3.1	Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi Jambi serta Politik Gubernur	33
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	33
Tabel 3.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	34
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan 2016-2018	37
Tabel 6.1	Indikasi Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	8
Gambar 2.2	Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 2.3	Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan	9
Gambar 2.4	Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Bidang/UPTD	10
Gambar 2.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi	11
Gambar 2.6	Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2010-2014	12
Gambar 2.6	Hasil Akreditasi Sekolah Tahun 2015	15
Gambar 3.1	Isu – Isu Strategis	17
Gambar 3.2	Capaian SPM Jenjang SD dan SMP di Provinsi Jambi	21
Gambar 3.3	Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015	23
Gambar 3.4	Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Tahun 2015	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta pemerintah yang bersih (*Clean Government*) di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tanah air. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik, dan administrasi publik, termasuk diantaranya upaya untuk membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan tersebut menyangkut dua aspek, yaitu aspek psiko-sosial dan aspek teknis-ekonomis. Aspek psiko-sosial diwujudkan dalam bentuk perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah, serta pembangkitan keberanian untuk berubah. Sementara itu aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja sebagai wujud perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal di atas sejak tahun 1999, Pemerintah sudah menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tidak lepas dari tuntutan reformasi tersebut di atas. Untuk itu, bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai salah satu perangkat pemerintah Provinsi Jambi, di dalam menyusun renstra diupayakan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dan disusun dengan cara mengintegrasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Perencanaan stratejik memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya langkah-langkah antisipatif yang diorganisasikan secara sistematis agar hasilnya dapat diukur melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis menggariskan arah perkembangan lembaga, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya utama untuk dapat merealisasikannya. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa rencana strategis yang mengabaikan realitas sumber daya, termasuk anggaran, seringkali tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan

yang perlu diperhitungkan di masa mendatang. Perencanaan strategis diperlukan untuk memandu proses penganggaran pembiayaan pembangunan, dan bukan sebaliknya.

Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah penting di dalam penyusunan rencana strategi guna memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan/kendala/ancaman (*Threats*) yang ada dewasa ini maupun kedepan. Analisis ini juga dilakukan karena merupakan dasar bagi penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi.

B. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2016-2021 disusun berdasarkan landasan berikut ini :

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 20 tahun 2010 Tentang Norma, Standar dan Prosedur Pengelolaan Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 20 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam peraturan Gubernur.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
18. Janji Politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
19. Aspirasi anggota DPRD Provinsi Jambi.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menetapkan prioritas pembangunan bidang pendidikan, dan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta pengendaliannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021). Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan di Provinsi Jambi serta instansi lainnya dalam rangka pembangunan bidang pendidikan.

D. Sistematika

Kerangka perumusan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan normatif penyusunan, sistematika penyusunan rencana strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Organisasi

Bagian ini akan menguraikan tentang Struktur Organisasi beserta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memberikan gambaran umum tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta langkah-langkah yang harus dilakukan guna menghadapi tantangan pendidikan serta isu-isu strategis yang berkembang di Provinsi Jambi.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada Bab ini akan dijabarkan mengenai visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi serta uraian mengenai faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dapat dijadikan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan.

Bab V Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat sebagai pengantar untuk menjelaskan tabel, isinya mengenai strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan serta rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja serta kelompok sasaran dan dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan, dan Sasaran RPJMD.

Pada bab ini terdapat uraian singkat padat sebagai pengantar untuk menjelaskan tabel yang terdapat di bab ini.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

A. Gambaran Umum Organisasi

Secara umum, profil Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi tanggungjawab di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

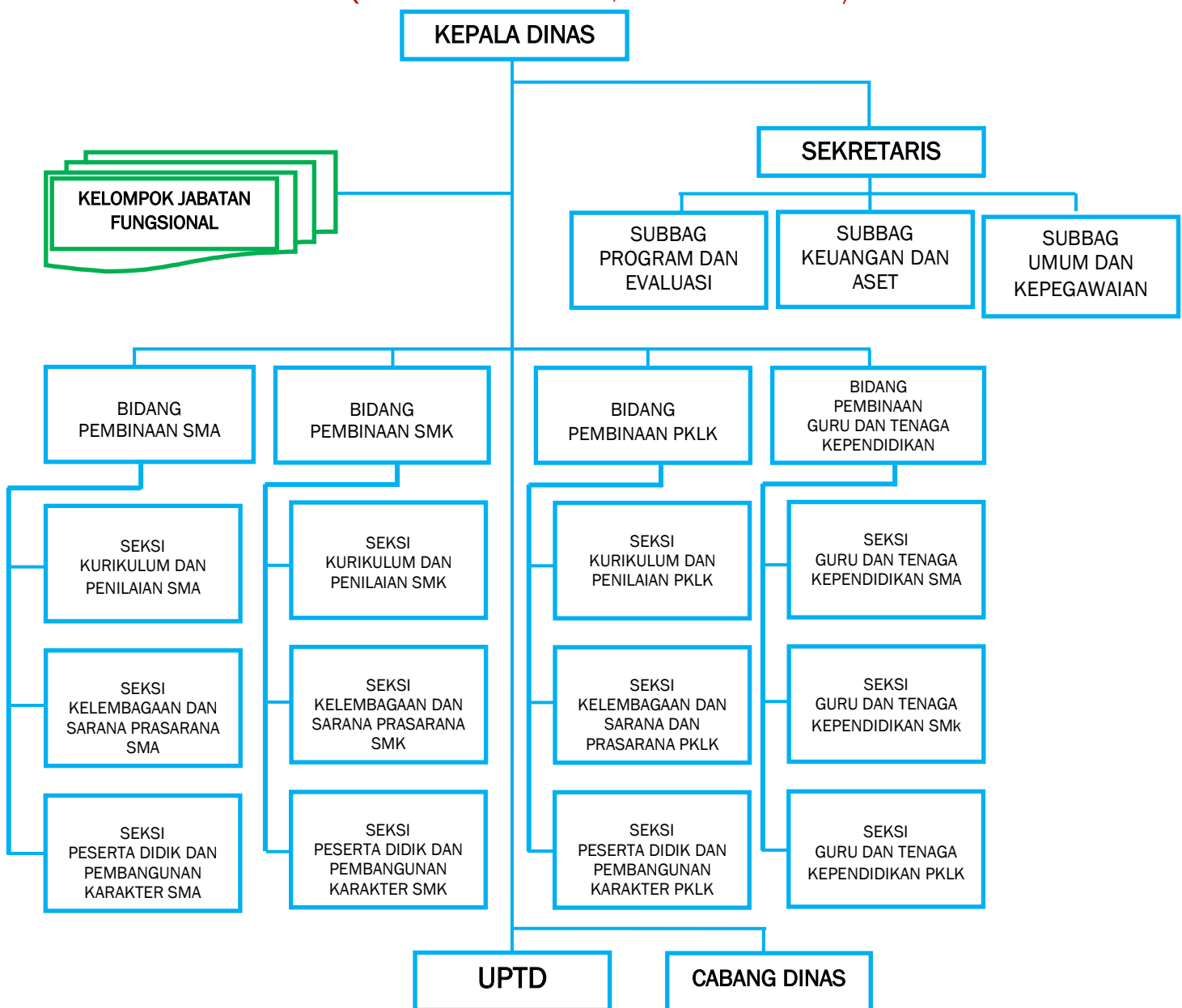
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambidapat digambarkan pada bagan sebagai berikut, personil sebagai sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan tersebut tersebar pada satuan unit kerja baik yang menduduki Eselon (pejabat) maupun Non Eselon.

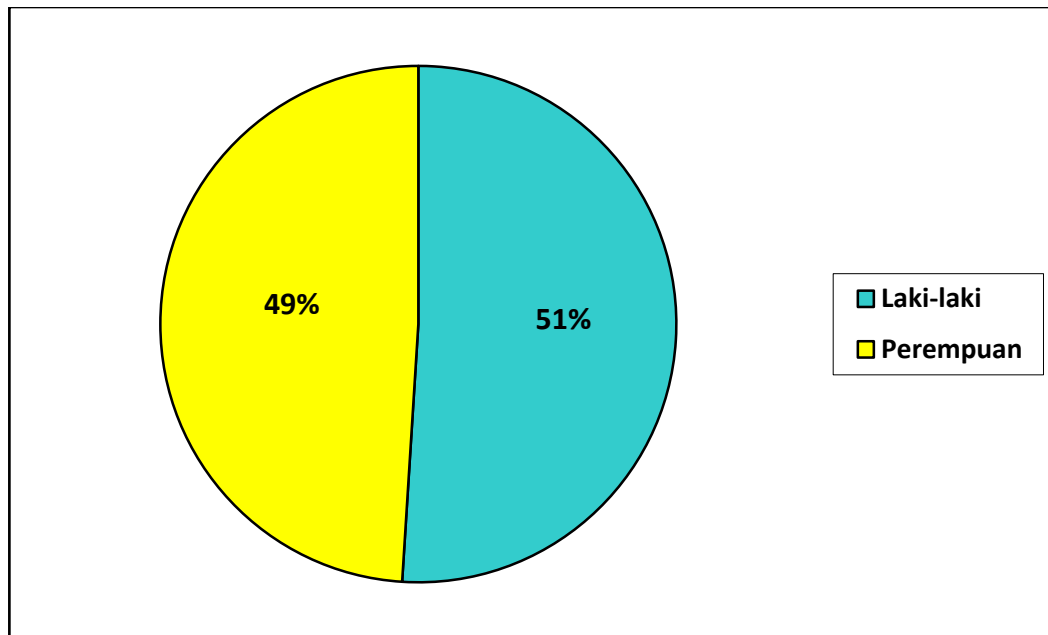
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

(Peraturan Gubernur Jambi, Nomor 35 Tahun 2016)

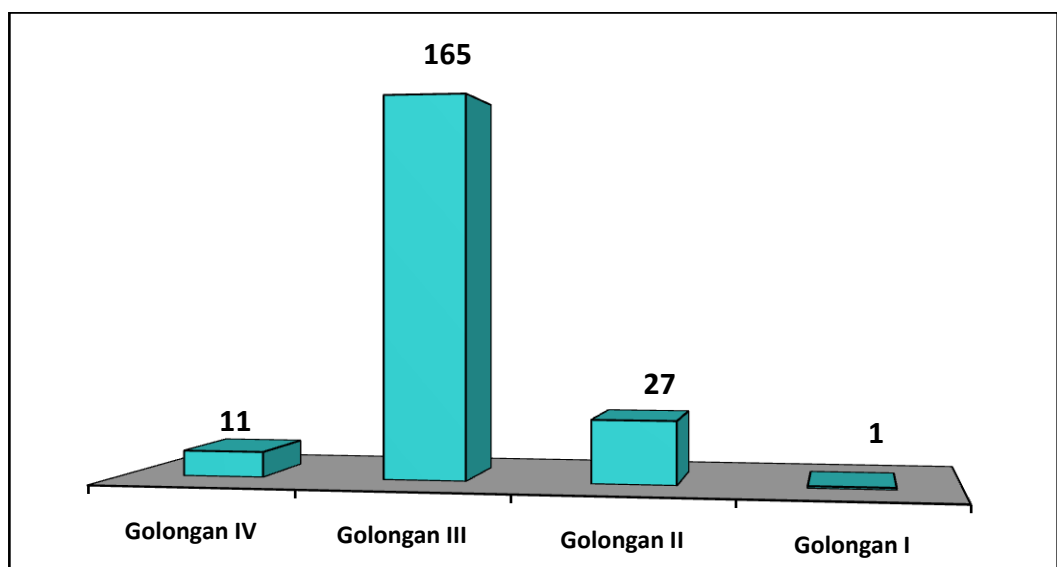


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

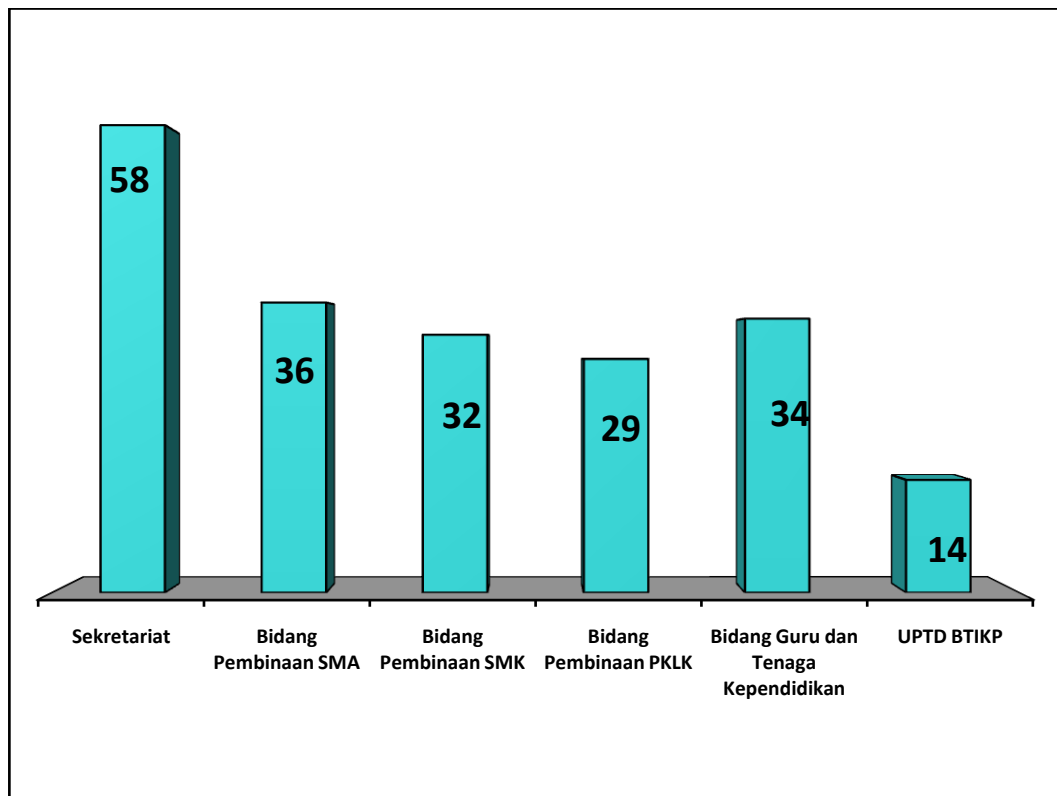
Organisasi sebagaimana yang tergambar diatas dilaksanakan oleh sumber daya yang ada, yaitu berupa karyawan yang tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Gambar 2.2. Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin



Gambar 2.3. Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan

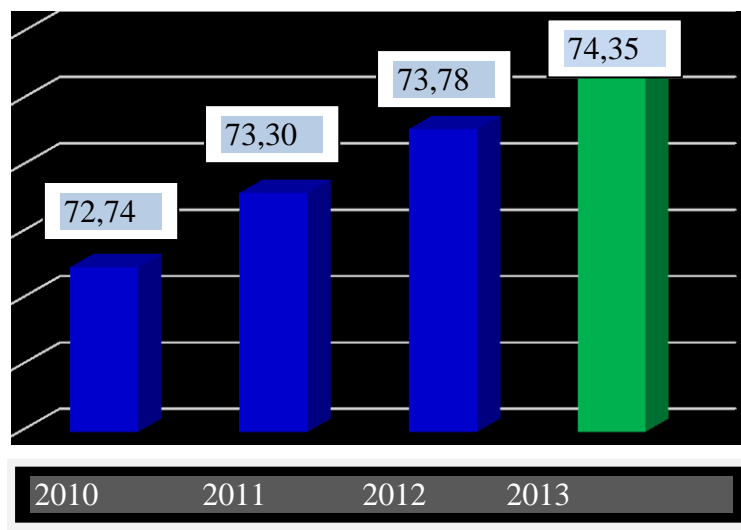


Gambar 2.4. Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berdasarkan bidang/ UPTD

Berdasarkan gambar diatas, pegawai Dinas Pendidikan berjumlah 204 orang terdiri dari kelompok jenis kelamin yaitu 105 orang atau 51% laki-laki dan 99 orang atau 49% perempuan, berdasarkan kelompok golongan yaitu golongan IV sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 165 orang, golongan II sebanyak 27 orang dan golongan I sebanyak 1 orang dan berdasarkan kelompok bidang/UPTD yaitu Sekretariat sebanyak 58 orang, bidang Pembinaan SMA sebanyak 36 orang, bidang Pembinaan SMK sebanyak 32 orang, bidang PKLK sebanyak 29 orang, bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebanyak 34 orang, UPTD BTIKP sebanyak 14 orang.

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dalam Pembangunan sumberdaya manusia pemerintah Provinsi Jambi konsisten menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Jambi. Salah satu komponen penghitungan besaran IPM tersebut adalah Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan peran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.



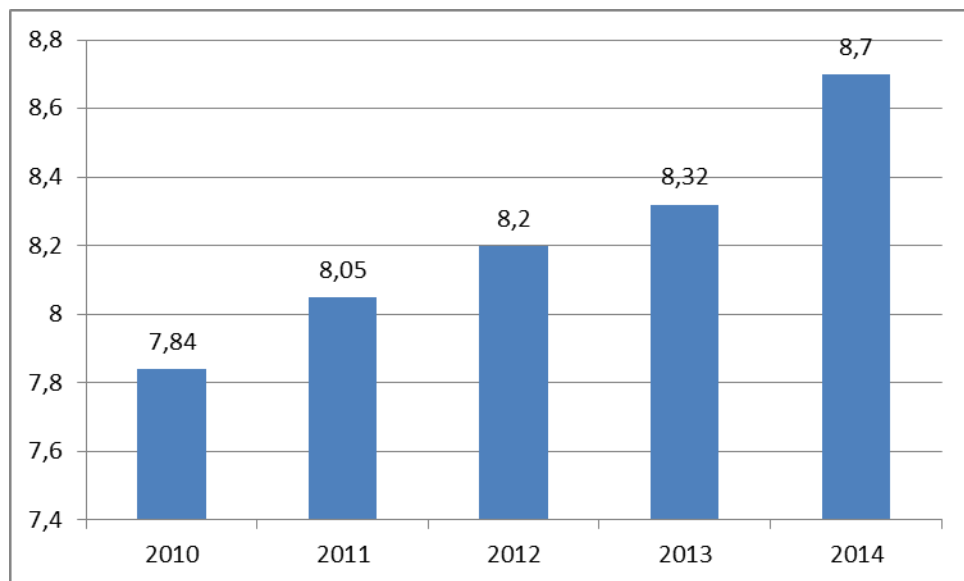
Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi terus meningkat, dari 72,74 pada tahun 2010 meningkat menjadi 74,35 pada tahun 2013. Memperhatikan perubahan angka indeks pembangunan manusia di atas yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun telah menggambarkan adanya keberhasilan yang cukup signifikan dalam pembangunan pendidikan di Jambi.

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Pada periode tahun 2010-2014, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 masih 7,84 tahun meningkat menjadi 8,7 tahun pada tahun 2014. Peningkatan persentase angka rata – rata lama sekolah di Provinsi

Jambi dalam kurun tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,64 persen tiap tahunnya.

Rata-rata peningkatan lama sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya yang tepat dan benar sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. Perlunya upaya percepatan ini juga perlu segera diimplementasikan karena lama sekolah yang hanya 8,7 tahun berarti rata-rata penduduk Jambi hanya sampai di kelas 3 SLTP.



Sumber: LKPJ AMJ Gub. Jambi Tahun 2010-2015 dan Rancangan Teknokratik RPJMDJambi, 2015

Gambar 2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2010-2014

Di samping hal di atas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada beberapa tabel-tabel berikut. Angka Partisipasi Kasar dan Murni menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, begitu juga dengan penambahan jumlah lembaga pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan APK dan APM Tahun 2010-2015

CAPAIAN kinerja 2010-2015 APK/APM			
No	Indikator	Status Awal (2010)	Capaian s.d. tahun 2015
1	APK PAUD	54,43	73,35
2	APK SD/SDLB/MI/Paket A	119,08	113,80
3	APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,72	99,85
4	APK SMP/SMPLB/MTS/Paket B	96,17	104,75
5	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	94,25	97,75
6	APK SMA/SMK/MA/Paket C	69,50	85,00
7	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	64,54	71,25
			72,29

APK/APM adalah indikator makro yang menyatakan jumlah anak usia sekolah yang telah memperoleh layanan pendidikan

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Jumlah Lembaga Tahun 2010-2015

CAPAIAN kinerja 2010-2015 JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN			
No	SATUAN PENDIDIKAN	Status Awal (2010)	Capaian S.d. 2015
1	Lembaga PAUD		
	a. TK	606	1.085
	b. TPA/KB/SPS	785	2.345 *)
2	Sekolah Dasar	2.321	2.400
3	SMP	566	633
3	SMA	196	215
4	SMK	101	158

*)KB =1.947 ; TPA= 118 ; SPS= 280

Indikator lainnya dapat pula disampaikan adalah akreditasi sekolah. Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi.

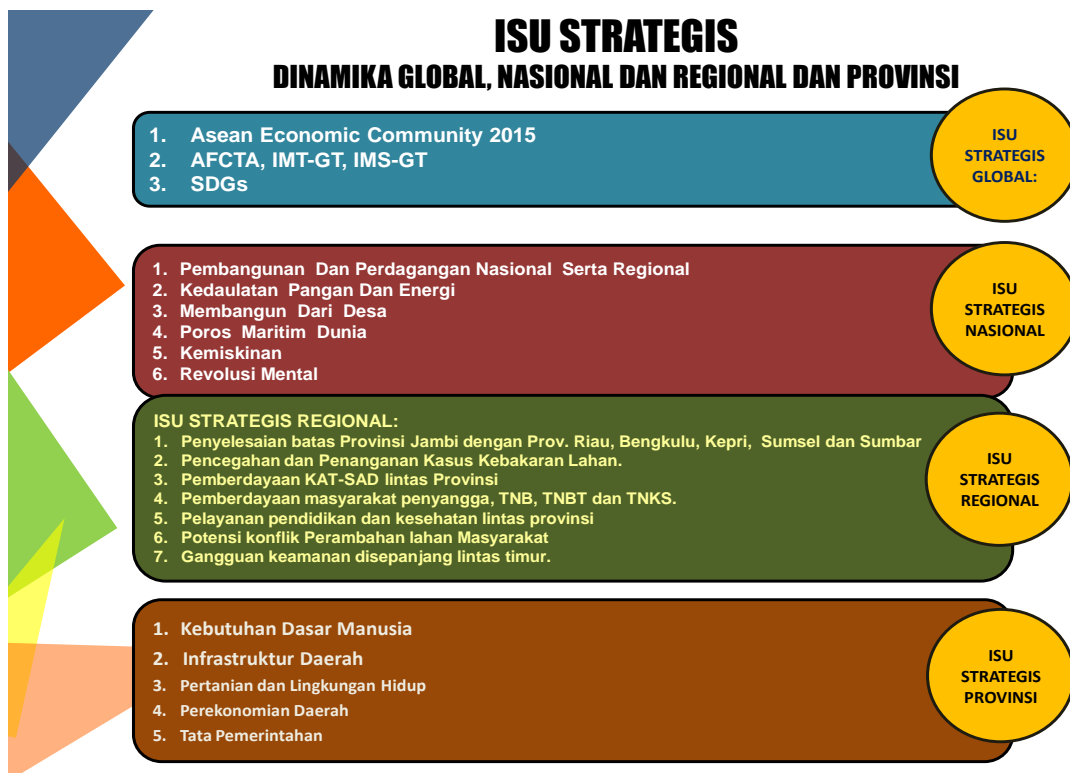
Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Hasil akreditasi di Provinsi Jambi khusus untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dari 211 sekolah yang diakreditasi 22,7 % memperoleh nilai A, 39,8 % nilai B, 17,1 % nilai C, dan masih terdapat 20,4 % sekolah yang belum diakreditasi.

Sementara untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 154 sekolah yang ada baru 6,5% memperoleh nilai A, 21,4% nilai B, 20,8% nilai C, dan masih terdapat 51,3% sekolah yang belum diakreditasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

BAB III
ISU ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis pendidikan di Provinsi Jambi untuk lima tahun mendatang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi ; (1) ketersediaan fasilitas layanan pendidikan (2) keterjangkauan layanan pendidikan, (3) mutu dan relevansi pendidikan masih harus terus ditingkatkan, (4) kesetaraan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan serta, (5) kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan. Kelima isu tersebut juga akan menjadi fokus Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan untuk periode tahun 2016-2021.

Sementara yang menjadi isu-isu strategis global, nasional, dan regional yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini, terutama dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi.



Gambar 3.1. Isu-Isu Strategis

A. Ketersediaan Layanan Pendidikan

Ketersediaan fasilitas layanan pendidikan mengandung arti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan dengan program yang telah digulirkan pemerintah pusat yaitu *education for all* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.

Pemerataan dan aksesibilitas pendidikan sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik/kependidikan. Kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SMP sederajat dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya SMA/MA/SMK, sehingga

mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu menampung murid. Selain hal tersebut di atas, masih ada wilayah di Jambi yang terisolir, terpencil dan tertinggal sehingga belum terlayani penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang optimal. Ditambah lagi masih terdapat kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dimana masyarakat cenderung untuk bersekolah di sekolah negeri dengan pertimbangan kualitas dan biaya pendidikan.

B. Terjangkau memperoleh layanan pendidikan

Keterjangkauan mengandung makna bahwa dari sisi geografis maupun ekonomis masyarakat mampu mendapatkan layanan pendidikan.

C. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Isu ini muncul dipicu oleh rendahnya kualitas lulusan. Mutu lulusan sangat berkorelasi salah satunya dengan rata-rata nilai Ujian Nasional, perolehan prestasi dalam lomba-lomba tingkat nasional, dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data menunjukkan, banyak siswa yang tidak terserap di lapangan kerja karena tidak mampu bersaing dengan lulusan lainnya karena tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

D. Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan

Isu ini muncul untuk mengurangi disparitas dalam rangka pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender dan sebagainya.

E. Kepastian

Isu ini dalam rangka penjaminan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Pembangunan Pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat hingga saat ini menunjukkan keberhasilan ketercapaian indikator kinerja yang cukup nyata, sebagaimana yang diuraikan di bab terdahulu. Namun demikian masih ditemui permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi pada periode tahun yang akan datang.

Permasalahan yang selalu berulang dari tahun ke tahun adalah ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara kabupaten/kota, kecamatan sampai ke sekolah-sekolah belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Lemahnya sistem pendataan pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas dan pencitraan publik pelayanan pendidikan. Namun dengan diterapkannya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sistem penggunaan data tunggal yaitu menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga permasalahan data pendidikan berangsur-angsur dapat diatasi. Permasalahan pendidikan yang perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, selain permasalahan data sebagaimana yang kami uraikan diatas, adalah hal-hal sebagai berikut :

1.Ketersediaan Pelayanan PAUD

Cakupan pelayanan PAUD sampai dengan Tahun 2015 sudah mencapai 73,5 % dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi antar daerah. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD Nonformal dan Informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (*Parenting Education*), dan masih rendahnya peran serta orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Begitu juga dengan tenaga pengajar (pamong) tidak luput dari permasalahan, keberadaan pamong yang memenuhi kualifikasi pendidikan masih sangat terbatas.

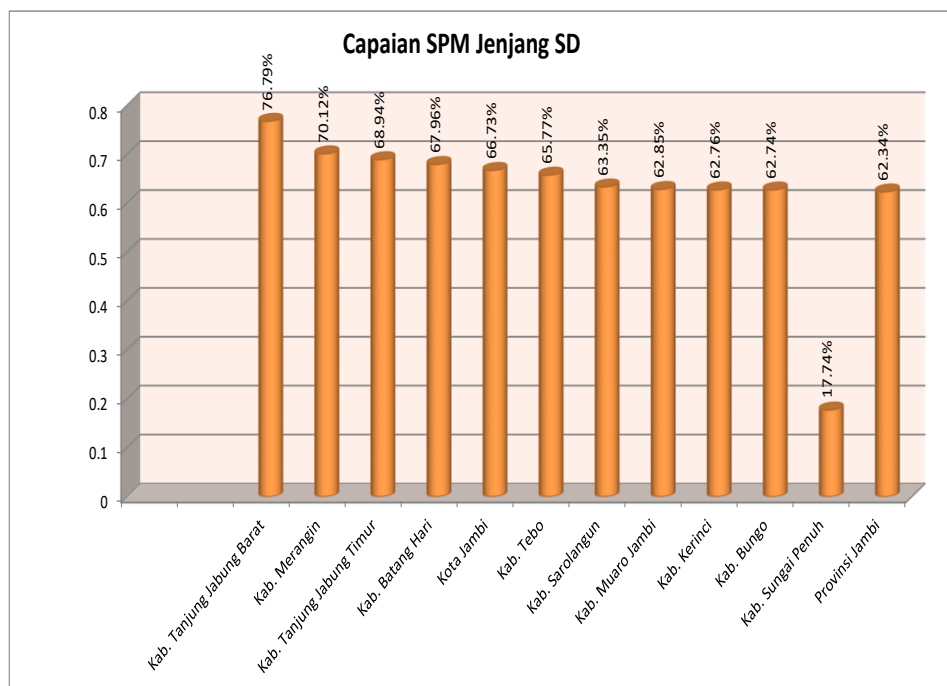
2.Pendidikan Dasar Bermutu

Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2015, terutama dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun demikian, kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan tahun 2016-2020. Kondisi ini antara lain terlihat pada tingkat disparitas antar daerah dan antar kelompok sosial-ekonomi yang masih cukup tinggi untuk SMP/SMPLB/MTs. Selain itu, masih terdapat siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, sementara itu peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun pada tingkat nasional rasio guru terhadap siswa cukup baik, namun demikian distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih rendah. Hingga tahun 2015, baru sekitar 19.827 (68,36%) dari guru SD/SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4, sementara pada jenjang pendidikan SMP/SMPLB/MTs baru mencapai 10.582 (78.69%). Begitu pula dengan guru yang telah lulus

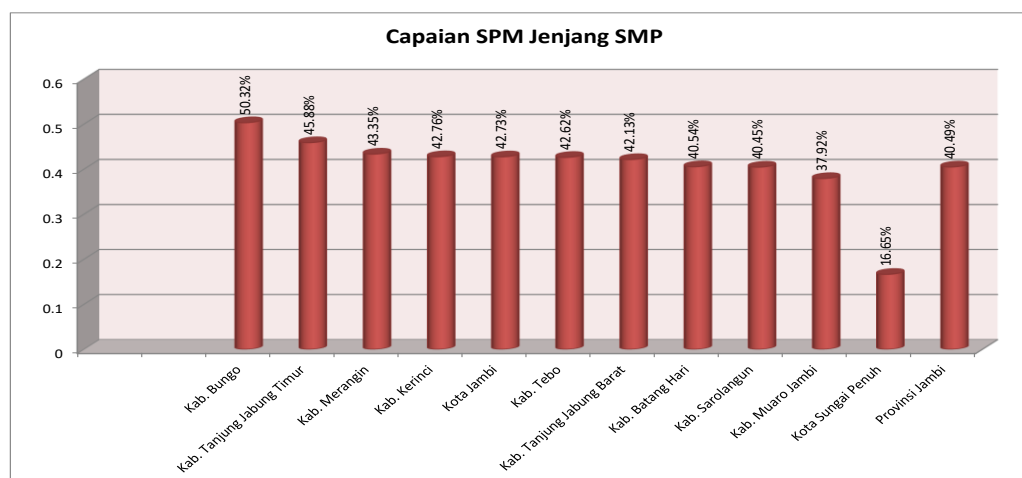
sertifikasihanya 9.901 (34,14%) guru SD dan 4.232 (31,47%) guru SMP telah bersertifikat pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

Selengkapnya capaian standar SPM jenjang SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut.

CAPAIAN SPM JENJANG SD



CAPAIAN SPM JENJANG SMP



Gambar 3.2. Capaian SPM Jenjang SD dan SMP di Provinsi Jambi

3. Pendidikan Menengah

APK jenjang pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015, APK jenjang pendidikan menengah telah mencapai 72,29,00 %. Namun pelaksanaan pendidikan menengah bermutu belumlah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya capaian nilai ujian nasional, dan masih minimnya lulusan siswa SMK yang diterima di dunia usaha dan di dunia industri. Selain itu, disparitas APK jenjang pendidikan menengah antarkabupaten dan kota juga masih relatif tinggi.

Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pada tahun 2015, apabila dilihat perbandingan lulusan jenjang SMP sederajat sebanyak 56.107, sedangkan tamatan SMA sederajat 40.176 ini mengindikasikan masih dibutuhkan ruang kelas baru sebanyak 498 ruang. Belum lagi kondisi perpustakaan SMA, dari 215 SMA negeri/swasta yang ada di Provinsi Jambi masih terdapat 54 sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Masih dibutuhkan 124 unit laboratorium komputer (TIK), 177 unit laboratorium bahasa, dan juga

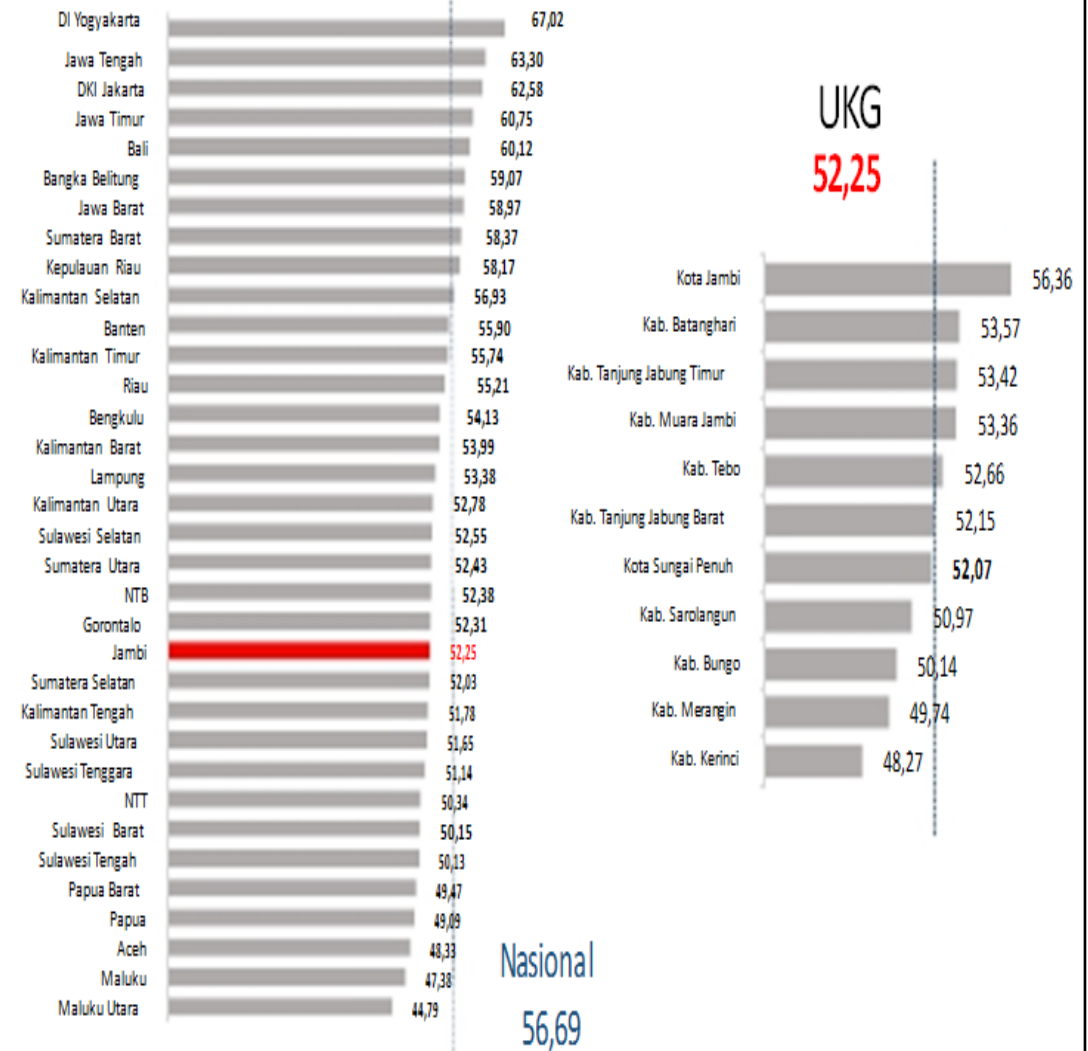
masih dibutuhkan sebanyak 196 ruang keterampilan di SMA. Tidak hanya di SMA di SMK juga demikian adanya dari 158 SMK negeri/swasta yang ada di Provinsi Jambi masih dibutuhkan 61 ruang praktek, 84 unit laboratorium TIK, dan 57 ruang perpustakaan.

Megacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa mulai 1 Januari 2017 kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan PKLK beralih dari kabupaten/kota ke provinsi. Hal ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintah Provinsi Jambi.

4. Kualitas Guru

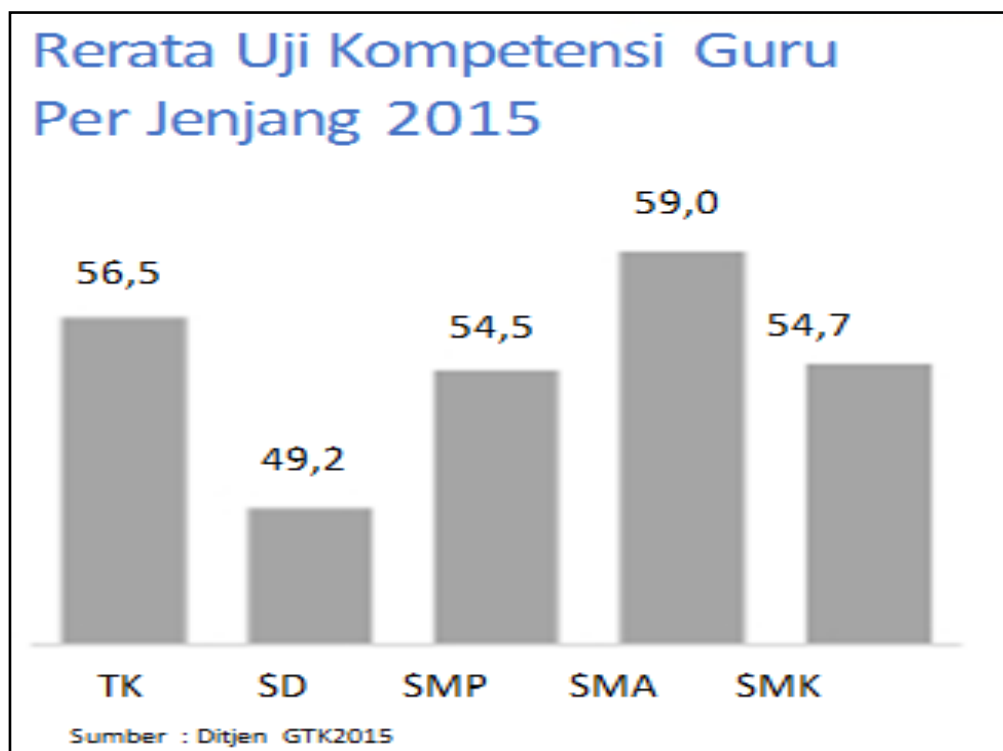
Pada pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi seluruh guru se Indonesia pada tahun 2015, untuk kompetensi Pedagogik dan Profesional hasilnya belum memuaskan. Dari segi nilai perolehan nilai terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 40,82 menjadi 52,25 namun dari segi peringkat provinsi Jambi menurun dari peringkat 21 menjadi peringkat 22 dari 34 Provinsi. Khusus untuk hasil UKG guru SMA dan SMK relatif lebih baik hasil capaiannya masing-masing 59,00 untuk jenjang SMA dan 54,70 untuk SMK sehingga kalau dirata-ratakan untuk jenjang pendidikan menengah telah mencapai nilai 56,85 sedikit di atas nilai rata-rata nasional yaitu 56,69. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Rerata Uji Kompetensi Guru 2015 (profesional & pedagogik)



Sumber : Ditjen GTK 2015

Gambar 3.3. Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015



Gambar 3.4. Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Tahun 2015

F. Tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai penanggung-jawab bidang pendidikan pada tingkat provinsi, salah satu aspek penting dalam hal tersebut adalah pengimplementasi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, koordinasi antar SKPD dan lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota belum sepenuhnya tertata dengan baik. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal.

Dari uraian diatas dapat dirangkum berbagai permasalahan bidang pendidikan di Provinsi Jambi adalah ;(1) Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah (2) Belum meratanya ketersediaan lembaga pendidikan antar Kabupaten dan Kota (3) Banyak kondisi infrastruktur sekolah yang belum terpenuhi (4) Belum optimalnya

proses belajar mengajar akibat keterbatasan sarana prasarana (5) Distribusi dan kualifikasi serta kompetensi Tenaga Pendidik yang belum merata (6) Sistem informasi manajemen yang berbasis TIK pada satuan pendidikan belum berjalan (7) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang masih umum, dan (8) Masih rendahnya lulusan sekolah menengah yang diserap sebagai tenaga kerja pada dunia usaha dan industri.

G. Tantangan Pembangunan Pendidikan

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan selama periode tahun 2010-2015 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mendatang sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten, dan kota.
3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah.
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
5. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal.
6. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.

7. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

H. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka visi pembangunanyang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu :

**"TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, DAN SEJAHTERA"
(JAMBI TUNTAS 2021)**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis, dan Berkesetaraan Gender.

3. Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat.
4. Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan dibidang Pendidikan terutama untuk mendukung Misi ke 2 (dua), yaitu : "Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis, dan Berkesetaraan Gender". Disamping itu Bidang Pendidikan juga harus mendukung Misi ke 4 (empat), yaitu : "Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan".

Dalam upaya mewujudkan dan mendukung kedua misi tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah :

1. Program Pendidikan SMA
2. Program Pendidikan SMK
3. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program BOSDA
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini (2016)

9. Program Pendidikan Non Formal (2016)

10. Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (2016).

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Penghambat

Penghambat strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memadai.
- b. Kerjasama pengelolaan pendidikan masih kurang memadai.
- c. SDM penyelenggara pendidikan belum memadai secara kuantitas dan kualitas.
- d. Motivasi belajar sebagian masyarakat yang masih rendah.
- e. Adanya budaya tradisional dan budaya luar yang kurang mendukung pendidikan.
- f. Relevansi jurusan SMK dengan; ketersediaan guru, sarana praktek, dan kebutuhan DUDI belum optimal.

2. Pendorong

Perhatian terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Pendorong Strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran pendidikan yang telah diatur pada Undang-Undang, namun masih perlu dipertegas pengertian proporsi 20%.
- b. Aparatur memiliki pengalaman mengelola pendidikan.
- c. Adanya komitmen pimpinan dan anggota organisasi yang kuat untuk memberikan layanan yang lebih baik.
- d. Penduduk Jambi masih banyak yang harus mendapat pelayanan pendidikan.
- e. Masyarakat menginginkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi

Visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah “ Tertib, Unggul, Tangguh, Adil, dan Sejahtera” (Jambi TUNTAS 2021).

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan misi, yaitu Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya agama dan berkesetaraan gender dan Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

Hal tersebut tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, melainkan dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jambi serta stakeholders pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, misi yang ditetapkan tersebut mengisyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk memberikan kebersamaan langkah dalam mencapai tujuan perlu kiranya dirumuskan nilai-nilai instansi yang akan dianut bersama. Nilai-nilai ini harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang

nantinya akan terkait erat dengan kegiatan pelayanan yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada stakeholder/masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai tersebut bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai luhur lainnya. Berikut nilai-nilai luhur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

1) Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspons dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses yang terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana penunjang yang baik, tepat dan memadai.

Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil. Di samping itu, kapabilitas yang tinggi tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan integritas moral/etika untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan

tugas-tugas organisasi. Semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak. Selain itu, organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3) Kemitraan

Di dalam era demokrasi yang sedang berkembang saat ini, pola-pola kerja kemitraan perlu dikembangkan dan diupayakan menghindarkan diri dari pola-pola lama yang menggunakan pendekatan kewenangan (*power approach*) ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan stakeholder (*stakeholder oriented approach*), sehingga terjalin hubungan yang harmonis/positif dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Jajaran Kementrian Agama dan stakeholders pendidikan lainnya.

B. Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi serta Janji Politik Gubernur.

Tabel 3.1 Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah

Provinsi Jambi serta Politik Gubernur

NAWA CITA	MISI KEMENDIKBUD	MISI PROVINSI JAMBI	JANJI POLITIK GUBERNUR
Nawa Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Nawa Cita 6. Meningkatkan Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Nawa Cita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa Nawa Cita 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Misi 1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat Misi 2 : Mewujudkan akses yang meluas dan merata Misi 3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu Misi 4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Misi 5 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya agama dan berkesetaraan gender	1. Pemberian tambahan penghasilan non Guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah 3. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis 4. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/ swasta

Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan antara pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi, dan janji politik gubernur terpilih, dalam penyusunan restra ini disandingkanlah program-program tersebut sehingga terdapat benang merah masing-masing program. Melalui upaya ini diharapkan semua program kegiatan yang disusun dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi, dan pada akhirnya akan bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah untuk mendukung pencapaian misi kedua pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APM SMA	44,63%	45,56%	46,53%	48,54%	50,68%	52,98%
			APK SMA	53,19%	53,30%	55,46%	57,85%	60,41%	63,15%
			APM SMK	25,17%	26,20%	27,18%	27,13%	27,20%	27,98%
			APK SMK	30,01%	30,98%	31,95%	31,74%	31,42%	30,98%
			Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah	NA	NA	20%	22%	24%	26%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMA)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMK)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Tingkat Kelulusan SMA	99%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%
			Tingkat Kelulusan SMK	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%	99,5%
			Persentase tamatan SMK yang bekerja	35%	40%	45%	50%	55%	60%
			Persentase Guru yang Bersertifikasi	37,49%	40,30%	43,32%	46,57%	50,06%	53,81%

D. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya serta memperhatikan kekuatan/ kelemahan yang dimiliki dan peluang-peluang/ ancaman yang ada, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun mendatang. Strategi merupakan cara mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntut pencapaian tujuan dan visi organisasi pada akhirnya.

1. Strategi

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan Pendidikan Menengah

2. Kebijakan

- a. Meningkatkan persentase guru bersertifikat
- b. Meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi berakreditasi baik melalui peningkatan SPM bidang pendidikan

3. Program dan Kegiatan Indikatif

- a. Program Pendidikan SMA dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - APM SMA
 - APK SMA
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMA
- b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - Persentase Guru yang bersertifikasi
- c. Program Pendidikan SMK dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - APM SMK
 - APK SMK
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMK
 - Persentase tamatan SMK yang bekerja
- d. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan			
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah.	a) Meningkatkan persentase guru bersertifikat	Program Pendidikan SMA	<ul style="list-style-type: none"> • APM SMA • APK SMA • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMA
	b) Meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi berakreditasi baik melalui peningkatan SPM bidang pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase guru yang bersertifikasi
		Program Pendidikan SMK	<ul style="list-style-type: none"> • APM SMK • APK SMK • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMK • Persentase tamatan SMK yang bekerja
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Pendidikan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai dinas penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan kompleksnya permasalahan Pendidikan. Dinas Pendidikan berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks tabel 5.1 berikut ini;

BAB VI

INDIKASI KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan, serta mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka program pembangunan yang akan ditempuh adalah untuk mencapai sasaran dalam kegiatan-kegiatan pokok yang berkaitan dengan; (1) ketersediaan fasilitas layanan pendidikan (2) keterjangkauan layanan pendidikan (3) mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan masih harus terus ditingkatkan (4) kesetaraan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan (5) kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Provinsi Jambi merupakan sebagian urusan wajib dari penyelenggaraan pemerintah, maka pada tabel berikut Indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Angka melanjutkan ke Perguruan Akreditasi B	42,30%	42,3%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%	60,73%
2	Tingkat Kelulusan SMA dan SMK	94%	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%	99,5%	99,5%

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Rencana Strategis, berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

Renstra ini merupakan hasil kesepakatan seluruh personil melalui mekanisme yang terstruktur, yang dijadikan pedoman dalam rangka pembangunan pendidikan Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana Strategis ini juga akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), disamping itu juga akan digunakan sebagai :

1. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.
2. Pedoman dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja.
3. Mengoptimalkan pelayanan prima.
4. Meningkatkan komunikasi dan informasi, serta transparansi.

Rencana strategis bukanlah merupakan sesuatu yang statis, namun dapat berubah sesuai dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Oleh karenanya jika terdapat perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi rencana strategis ini maka akan dilakukan revisi sesuai kebutuhan organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan

DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta dan lembaga masyarakat.